

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Kampanye pemilihan presiden pada tahun 2009 lalu menyisakan sebuah fenomena yang menarik. Pada saat itu berbagai isu dan pesan politik bermuatan agama tampak marak berlangsung. Fenomena tersebut juga gencar diberitakan dalam berbagai media massa nasional sehingga semakin menambah hangat fenomena yang terjadi. Uniknyanya tidak semua media massa memiliki cara yang sama dalam mengemas fenomena tersebut pada publik. Hal ini menjadi terutama menjadi menarik bagi media massa nasional seperti *Republika* yang telah lama di kenal memiliki keterkaitan dengan kelompok umat Islam Indonesia.

### **1. Latar Belakang Masalah**

“Politik primordial telah mati”, itulah kesimpulan *Lembaga Survei Indonesia* (LSI) pada 9 Juli 2009. Survei mereka kala itu menunjukkan bahwa tokoh-tokoh ormas Islam tidak lagi memiliki pengaruh yang berarti pada masyarakat yang lebih memilih berdasarkan pertimbangan rasional. Survey yang diadakan oleh LSI tersebut menunjukkan bahwa responden yang memilih berdasarkan pertimbangan agama hanyalah 1,3%, kalah jauh dari responden yang memilih berdasarkan program-program yang meyakinkan (38,6%) dan pro rakyat (35,6). Variabel agama bahkan kalah dari variabel mudah di ingat (8,2%), ikut keluarga (7,4%), dan ikut orang lain (3%) (Rilis hasil exitpool LSI, 9 Juli 2009). Hasil dan kesimpulan ini kemudian juga di dukung oleh hasil pemilu legislatif 2009 yang

menunjukkan tidak populernya partai-partai berbasis agama seperti PKS dan PAN. PKS misalnya hanya mampu meraih suara 7,88% dengan perolehan kursi DPR 10,18 % (Mega Prabowo Sepakat. (15 Mei 2009). *Suara Merdeka*: 1). Hal ini tentu jauh dari target mereka untuk memperoleh suara hingga 20% (Semangat Populis Partai Dakwah. (30 Maret – 5 April). *Tempo*: 51). Bahkan PAN sebagai partai Islam yang berimage paling moderat pun hanya dapat memperoleh suara 6,01% dan 43 kursi DPR (Mega Prabowo Sepakat. (15 Mei 2009). *Suara Merdeka*: 1). Jauh dari target mereka untuk memperoleh 100 kursi (Satu Mentari Dua Warna. (30 Maret – 5 April). *Tempo*: 69).

Fenomena ini, walaupun berakibat negatif pada partai-partai Islam, menunjukkan gambaran yang positif bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Berdasarkan survey tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh berbagai isu agama dalam memilih calon yang dikehendaki baik eksekutif maupun legislatif. Masyarakat beragama di Indonesia telah dapat berperilaku toleran secara politik dengan menghindari kedekatan agama tertentu untuk memutuskan pilihannya. Toleransi politik ini menjadi penting karena menurut Bernard Lewis ujian untuk melihat apakah *civil society* ada atau tidak di negara-negara Muslim adalah toleransi. Sementara itu, Schmitter menegaskan bahwa *civil society* memberi kontribusi pada konsolidasi demokrasi, karena ia membantu menciptakan toleransi di antara warga negara (Mujani, 2007: 153). Toleransi politik dengan demikian dibutuhkan oleh semua negara demokratis, terutama Indonesia yang tidak hanya berupaya untuk menjadi demokratis, namun

juga memiliki masyarakat yang majemuk dan pluralistik. Keterkaitan toleransi politik dan pluralisme ini dapat dilihat dari pernyataan Dahl:

*Sulit disangkal bahwa pluralism subkultural kerap kali menimbulkan ketegangan yang berbahaya bagi toleransi dan keamanan bersama, yang dibutuhkan bagi sistem kontestasi publik (Dahl dalam Mujani, 2007: 154).*

Pernyataan Dahl ini kemudian diteruskan oleh Mujani yang mengatakan bahwa dalam masyarakat yang terbelah secara primordial, sikap dan perilaku intoleran cenderung mengancam stabilitas demokrasi. Lebih dari itu, partisipasi politik bisa jadi berbahaya bagi demokrasi itu sendiri, jika partisipasi politik tidak dibarengi dengan toleransi apalagi bila intoleransi itu terjadi di tingkat elite (Mujani, 2007: 155). Bahaya dari intoleransi dalam demokrasi ini salah satunya adalah dapat munculnya penguasa-penguasa otoritarian dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang kebijakannya cenderung merugikan kelompok lainnya. Dahl sendiri berpendapat bahwa tokoh bermentalitas otoritarian tersebut dapat membuat merosotnya konsensus mengenai norma-norma dasar dikalangan orang-orang yang aktif secara politik (Dahl dalam Mujani, 2007: 155), karena tokoh otoritarian tersebut akan berupaya untuk menerapkan norma-norma kelompok mereka sendiri dalam berpolitik.

Survei LSI pada 9 Juli 2009 tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tampaknya tengah menuju pada *civil society* yang penuh toleransi, akan tetapi berbagai fenomena "miring" pada masa kampanye presiden 2009 tampaknya menunjukkan bahwa fenomena toleransi ini masih masih terlalu dini untuk diamini. Pada saat itu mulai berkembang isu-isu mengenai keharaman memilih presiden wanita (Raden Trimutia Hatta. (2009). *PDIP: Isu Capres*

*Wanita Haram Basi*. Dalam <http://www.inilah.com/berita/politik/2009/04/07/96917/pdip-isu-capres-wanita-haram-basi/>. Di unduh pada tanggal 21 Juni 2009 pukul 21:23 WIB), keharaman demokrasi dan pemilihan umum (Fadly. (2009). *Hukum Demokrasi dan Holput dalam Pandangan Islam*. Dalam <http://arrahmah.com/read/2009/03/27/3729-hukum-demokrasi-dan-golput-dalam-pandangan-islam.html>. Di unduh pada tanggal 21 Juni 2011 pukul 23:45 WIB), dan yang telah lebih dulu muncul, adanya wacana fatwa haram golput (Rachmat Hidayat. (2008). *Usulan Fatwa Haram Golput dinilai Keliru*. Dalam <http://nasional.kompas.com/read/2008/12/13/20181525/Usulan.Fatwa.Haram.Golput.Dinilai.Keliru>. Di unduh pada tanggal 21 Juni 2011 pukul 23:58 WIB).

Isu lain yang muncul adalah kabar angin yang mempertanyakan agama yang di anut oleh calon wakil presiden dari SBY yaitu Boediono. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini diragukan ke-Islamannya dan di sinyalir mempraktikkan ajaran-ajaran Kejawen. Kabarnya PKS menolak Boediono dikarenakan isu tersebut (Raden Trimutia Hatta. (2009). *PKS Tolak Boediono karena Isu Kejawen*. Dalam <http://www.inilah.com/berita/2009/05/12/106367/pks-tolak-Boediono-karena-isu-kejawen/>. Diunduh pada tanggal 21 Juni 09 pukul 20:45 WIB). Kabar lain yang tidak kalah menarik sekaligus memprihatinkan adalah isu yang mengabarkan bahwa Herawati, istri dari Boediono, adalah seorang penganut agama Katolik. Isu miring tersebut segera saja di tampik oleh tim kampanye SBY-Boediono (Raden Trimutia Hatta. (2009). *Tuduhan Istri Boediono Katolik tak Bermoral*. Dalam <http://www.inilah.com/berita/politik/2009/06/02/112012/tuduhan-istri-boed-katolik-tak-bermoral/>. Diunduh pada tanggal 21 Juni 2009

pukul 20:55 WIB). Isu keagamaan dari Boediono dan Herawati tersebut kemudian menjadi memanas di masa kampanye karena dikomunikasikan dalam selebaran yang disebarakan pada saat kampanye pasangan JK-Win. Isu tersebut juga mengingatkan pada pemilihan presiden yang lalu di mana pada saat itu isu-isu yang serupa bermunculan. SBY misalnya saat itu diisukan sebagai muallaf atau orang yang baru masuk Islam. Istri SBY sendiri, *Kristina* Herawati, juga diisukan sebagai penganut ajaran Nasrani hanya karena namanya tampak seperti nama umat Kristiani (Anonim. *Kristiani Herawati: Pendamping Sepadan Presiden*. (2005). Dalam <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/k/kristiani-herrawati/index.shtml>. Diunduh pada tanggal 21 Juni 2009 pukul 21:47 WIB).

Fenomena negatif di masa kampanye ini menunjukkan bahwa toleransi politik di Indonesia tampaknya belum merasuk pada elit politik di Indonesia. Tradisi politik yang toleran dan multikultural belum dapat di capai dengan mudah, lalu bagaimana dalam media massa? Menurut pandangan kaum positivis media massa memiliki peranan yang besar untuk membentuk tradisi toleran tersebut karena media massa memiliki fungsi, dampak, dan signifikansi yang besar pada khalayak atau audiens. Media massa sebagai alat dari komunikasi massa tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui tanda-tanda atau simbol-simbol dalam teks berita tersebut yang kemudian akan dimaknai oleh masyarakat, namun juga mampu menjadi agen transmisi budaya yang memelihara konsensus budaya dan selalu hadir dalam berbagai bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu. Melalui individu komunikasi menjadi bagian dari pengalaman kolektif kelompok, publik,

audience berbagai jenis dan individu bagian dari suatu massa. (Nurudin, 2004: 71). Pandangan naif tersebut menganalogikan bahwa media massa Indonesia seharusnya lepas dari berbagai afiliasi keyakinan dan bersikap sebagai mediator serta ruang publik bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak peduli apapun latar belakang keyakinan mereka.

Akan tetapi realitanya tidaklah seindah demikian karena banyak media massa di Indonesia yang memiliki latar belakang afiliasi dengan agama tertentu dan secara praktik masih terjebak dalam favoritisme agama afiliasi mereka. Praktik tersebut bahkan juga terjadi pada media-media besar umum seperti *Kompas* yang memiliki afiliasi kuat dengan kelompok Katolik, *Suara Pembaruan* yang berafiliasi dengan umat Kristen Protestan, dan terutama *Republika* yang memiliki afiliasi kuat dengan kelompok Muslim. Setiap media tentu sama-sama memberitakan berbagai isu negatif pada masa kampanye, akan tetapi mereka tentu juga memiliki perspektif yang berbeda dalam membingkai pemberitaan tersebut. *Republika* misalnya lebih berani dan eksplisit dalam memberitakan berbagai isu agama dalam kampanye politik. Pada masa kampanye pemilihan presiden 2009 *Republika* mengeluarkan sebuah kolom dua halaman berjudul “*Koran Pemilu*” yang membahas secara khusus isu-isu seputar pemilihan umum tersebut. Hampir pada setiap kolom tersebut *Republika* selalu menyajikan pemberitaan politik yang terkait dengan umat Islam. Tercatat pada masa kampanye tersebut terdapat 16 edisi yang pemberitaan berhubungan dengan umat Islam dan kampanye politik. Sebagian besar pemberitaan tersebut terkait dengan upaya penggalangan suara calon presiden pada ulama, pesantren, ormas islam, dan isntitusi-institusi

keislaman lainnya. *Republika* juga memberitakan penggalangan suara pada institusi non-islam, akan tetapi jumlahnya tidaklah signifikan atau jauh dari pemberitaan terhadap institusi Islam.

Selain isu penggalangan suara pada kaum Muslimin *Republika* juga memberitakan beberapa isu yang menarik terkait dengan politisasi agama (religio-politik)<sup>1</sup>. Pada Edisi 1 Juni 2009 misalnya, *Republika* mengeluarkan tulisan berjudul *JK: Jangan Suruh Istri Saya Lepas Jilbab* (*Republika*, 1 Juni 2009: Hal 8, kolom 6). Pemberitaan itu terkait dengan tuduhan bahwa pasangan *JK-Win* menggunakan symbol-simbol agama dalam berkampanye. Simbol tersebut adalah kedua istri mereka yang berjilbab sehingga terkesan lebih saleh ketimbang istri atau capres lain yang tidak berjilbab. Penekanan berita tersebut adalah pada penolakan *JK* atas tuduhan tersebut yang dianggap seolah-olah menyuruh istrinya untuk melepas jilbab. Berita tersebut juga dilanjutkan dengan judul *Ruhut Rasis* yang berisikan pemberitaan mengenai pernyataan Ruhut yang menyudutkan komunitas Arab. *Republika* mengutip pernyataan dari Ketua *Persaudaraan Nasionalis Arab Indonesia* (PNAI) yang menyatakan bahwa pernyataan *Ruhut* terkesan rasis dan menjelek-jelekan kaum Arab dunia umumnya dan Arab Indonesia khususnya.

Pemberitaan *Republika* di sini terkesan membela posisi *JK* dengan politisasi jilbabnya dan membela kaum Arab yang digambarkan disudutkan oleh pernyataan *Ruhut Sitompul*. Isu pernyataan *Ruhut Sitompul* ini sendiri sangat terkait dengan agama, karena bangsa Arab pada umumnya beragama Islam dan *Ruhut Sitompul*

---

<sup>1</sup> Yang dimaksud isu religio-politik dalam penelitian ini lebih tepatnya mengacu pada isu-isu agama dalam ruang politik seperti isu pemilihan presiden yang dibenturkan dalam prinsip kepemimpinan Islam, wanita dalam politik menurut Islam, dan non-Muslim dalam politik.

adalah non-muslim sehingga menimbulkan kesan penyudutan non-muslim terhadap kalangan Muslim. keterkaitan isu tersebut dengan agama dengan jelas terlihat saat pernyataan Ruhut Sitompul tersebut di protes oleh Front Pembela Islam (FPI) yang notabene adalah ormas Islam. Kasus ucapan Ruhut tersebut kemudian dilanjutkan dalam pemberitaan pada edisi 3 Juni dengan judul *Masyarakat Diminta Maafkan Ruhut (Republika, 3 Juni 2009: Hal 5, kolom 2)*. Pemberitaan tersebut berisi permintaan Hatta Rajasa untuk memaafkan ucapan Ruhut Sitompul yang di nilai sebagai pernyataan pribadi.

*Republika* juga mengeluarkan pemberitaan pada edisi 9 Juni 2009 yang berjudul, “*Ekonomi Syariah Opsi Serius*” (*Republika, 9 Juni 2009, hal: 1, kolom 2*). Pemberitaan tersebut berisi mengenai pernyataan Boediono yang bernada positif terhadap ekonomi syariah dan menyatakannya sebagai prosektor riil. Pemberitaan itu sendiri menjadi headnews dan diletakkan di halaman muka koran dengan font judul yang besar. Hal ini tentu menjadi dipertanyakan karena isu ekonomi Syariah dalam politik selama ini tidaklah di nilai “seksi” dan layak untuk menjadi suatu headnews. Pemberitaannya sendiri terkesan terlalu bombastis dan naif mengingat isu tersebut hanyalah merupakan wacana yang dikeluarkan oleh Boediono sebagai bagian dari strategi kampanye pasangan SBY-Boediono.

Terkait dengan isu mengenai istri Boediono *Republika* tampaknya memberitakan dengan hati-hati. Berita tersebut mulai di muat dalam koran edisi 25 Juni 2009 dengan judul berita, “*Istri Boediono Diserang*” (*Republika, 25 Juni 2009, hal: 5, kolom 2*). Isi pemberitannya sendiri cukup singkat karena hanya di beri ruang satu kolom serta sama sekali tidak menyebutkan agama yang diisukan



pada istri Boediono, yaitu Katolik. Secara keseluruhan beritanya tidaklah mencolok dan tampak seolah-olah sebagai peristiwa biasa. Hal ini sangat bertolak belakang dengan isu wacana ekonomi syariah. Isu selebaran gelap ini sebenarnya sangatlah seksi hampir selalu muncul dalam televisi di kala masa kampanye tersebut, sehingga tampak aneh kalau porsi pemberitaan yang diberikan terhadap isu tersebut sangatlah minim

*Republika* kemudian mengikuti isu tersebut dengan memberikan pemberitaan berjudul, “*Kasus Herawati Boediono di-Bawaslu-kan*” (*Republika*, 26 Juni 2009, hal: 4, kolom 1), yang diterbitkan pada edisi 26 Juni 2009. Pemberitaan itu berisi keinginan pihak partai Demokrat untuk melaporkan isu selebaran gelap tersebut pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berita tersebut juga telah secara eksplisit menunjukkan agama yang di”gosipkan” pada ibu Herawati, yaitu Katolik, akan tetapi secara keseluruhan pemberitaannya juga tidaklah terlalu mencolok.

Sementara itu koran lain seperti *Jawa Pos* dan *Kompas* memberitakan isu tersebut dengan cara yang berbeda. *Jawa Pos* misalnya mengeluarkan beberapa pemberitaan isu kampanye bernuansa agama seperti kasus istri Boediono. Mereka setidaknya mengeluarkan tiga pemberitaan semasa kampanye seperti berita berjudul “*Kubu SBY Laporkan Tim JK*” (*Jawa Pos*, 26 Juni 2009) dengan headline singkat “*Terkait pemberitaan yang pojokkan istri Boediono*”. Judul pemberitaan yang lain adalah “*Penyebar dibayar Rp 20 ribu*” (*Jawa Pos*, 30 Juni 2009) dengan headline singkat “*Dalang penyebar black campaign tak jelas*”. Judul pemberitaan lain seperti “*Kubu Boediono Minta Penjelasan JK*” (*Jawa Pos*,

2 Juli 2009) dengan headline singkat “*Soal selebaran bernuansa SARA*”. Judul dan headline pemberitaan ini memang belum dapat menjelaskan banyak mengenai sikap *Jawa Pos*, akan tetapi terlihat jelas bahwa terkait isu istri Boediono *Jawa Pos* menganggapnya sebagai black campaign dan isu SARA, walaupun kemudian juga *Jawa Pos* menganggap isu ke-katolik-an tersebut sebagai pemojokan. Sementara itu dalam harian *Kompas* agak sulit untuk menemukan pemberitaan terkait dengan isu istri Boediono. Terlihat *Kompas* sangat berhati-hati dengan isu SARA dan mengkategorikan mengkategorikan isu tersebut sebagai kampanye gelap dengan hanya memberikan pemberitaan berjudul “*JK-Win Sikapi Serius Selebaran Gelap*” (*Kompas*, 30 Juni 2009). Pada pemberitaan tersebut *Kompas* juga tidak menunjukkan agama apa yang diisukan di anut oleh istri Boediono dan hanya menyebutnya sebagai non-muslim.

## **2. Perumusan Masalah**

Fenomena kampanye bermuatan agama pada pemilihan presiden 2009 menunjukkan bahwa konsep toleransi politik sulit untuk tercapai, karena dalam masyarakat beragama masih terdapat pertentangan dan upaya untuk saling mendominasi dalam bidang politik. Media massa pun tidaklah luput dari hal ini karena media massa besar Indonesia, terutama surat kabar, ternyata cenderung terkotak-kotak dalam sekat afiliasi agama, walaupun kadang mereka menyatakan diri sebagai media nasional. Fenomena ini kemudian juga menimbulkan pertanyaan khusus pada *Republika* sebagai harian dengan latar belakang Islam yang kuat. *Republika* tampak memiliki kebijakan yang lebih longgar dalam memberitakan isu agama, akan tetapi pemberitaan mereka kurang berimbang

karena lebih banyak meliput isu yang terkait dengan umat Muslim, terutama terkait dengan proses kampanye politik. Hal menarik lain dari koran *Republika* ini adalah adanya fenomena yang menunjukkan bahwa tampaknya mereka tidaklah “semilitan” seperti yang selama ini telah terlanjur di kenal oleh berbagai pengamat media<sup>2</sup>. Hal ini terlihat dari isu “Istri Boediono” yang tidak mendapatkan porsi besar jika dibandingkan dengan isu ekonomi Syariah. Hal ini menjadi menarik karena *Republika* tampak mengacuhkan isu murahan dan bermuatan SARA walaupun isu itu sendiri sangatlah “seksi” untuk di liput.

Fenomena tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan yang menarik. Bagaimanakah kebijakan *Republika* saat memberitakan isu religio-politik dalam masa kampanye presiden dan wakil presiden tahun 2009 lalu? Apa kebijakan model ke-Islaman *Republika* itu sendiri? Dan bagaimanakah toleransi politik *Republika* dalam pemberitaan tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan di jawab melalui analisis *gatekeeping* yang akan mewawancarai beberapa pekerja media *Republika* yang tentunya memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan redaksional media tersebut. Akan tetapi sebelumnya juga akan dilakukan analisis tekstual pada teks pemberitaan tersebut untuk mendapatkan data tambahan sekaligus pembanding yang baik bagi hasil wawancara tersebut.

---

<sup>2</sup> Pengamat ini adalah seperti *Lembaga Survei Indonesia* yang pernah mengatakan bahwa *Republika* mengalami “radikalisasi pemberitaan” saat meliput peristiwa konflik di Maluku (Sudibyo dkk, 2001:175).

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan redaksional *Republika* dalam pemberitaan religio-politik, pada masa kampanye presiden tahun 2009.

### **4. Signifikansi Penelitian**

#### **4.1. Signifikansi Akademis**

Secara akademis penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi dalam media massa, terutama agama dalam media massa yang dikaitkan dengan konsep toleransi politik.

#### **4.2. Signifikansi Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pelaku industri media dalam menjalankan kerja jurnalistik mereka, terutama dalam memberitakan isu-isu religio-politik dalam kampanye politik.

#### **4.3. Signifikansi Sosial**

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pada kehidupan bermasyarakat, terutama terkait dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural dan multi keyakinan sehingga demokrasi, pluralisme, civil religion, dan toleransi politik menjadi isu yang krusial

## 5. Kerangka Konseptual dan Teoritik

### 5.1. *State of the Art*

*Republika* selama ini telah banyak dijadikan subyek penelitian oleh para akademisi. Kebanyakan penelitian yang dilakukan melihat keterkaitan agama dengan praktik jurnalistik yang dilakukan oleh *Republika* melalui analisis bahasa. Penelitian Agus Sudibyo misalnya mencoba untuk memahami prasangka antar umat beragama dalam pemberitaan *Republika* melalui analisis bahasa<sup>3</sup>. Dalam penelitian tersebut Agus Sudibyo menyimpulkan media Islam seperti *Republika* lebih berani dalam memberikan evaluasi-evaluasi yang mensiratkan prasangka negatif tentang kelompok-kelompok Kristen. Prasangka tersebut terlihat dari penggunaan istilah-istilah kunci yang bersifat konotatif, metaphor, dan hiperbolis, serta symbol-simbol visual (foto) yang digunakan untuk merekonstruksi fakta kerusuhan (Sudibyo dkk, 2001:173). Sudibyo mengatakan bahwa *Republika* masih terlihat santun, teduh, simpatik terhadap umat Islam namun tidak berprasangka terhadap umat Kristen serta netral saat memberitakan isu kerusuhan di Ketapang, Kupang, dan pemboman masjid Istiqlal. Sifat ini berubah drastis saat *Republika* memberitakan isu kerusuhan di Maluku. Sudibyo mengatakan bahwa *Republika* mengalami “radikalisasi” pemberitaan dengan menjadi sangat tendensius terhadap umat Kristen, vulgar, emosional, dan sering menggambarkan umat Kristen dengan sangat buruk. Sudibyo bahkan mengatakan bahwa *Republika* terkesan memprovokasi umat Islam untuk berjihad membela Muslim Maluku (Sudibyo dkk, 2001:175).

---

<sup>3</sup> Dalam penelitiannya Agus Sudibyo mengambil sampel dari empat isu pemberitaan, yaitu kasus Kerusuhan di Kupang, Ketapang, dan Maluku serta Kasus Pengeboman Masjid Istiqlal di Jakarta.

Sementara itu pendapat yang agak berbeda dapat ditemukan dalam penelitian H.M. Achjar. Dalam penelitiannya ia berusaha memahami latar belakang pemuatan berita seputar diskursus keagamaan di Harian *Republika* serta dampak sosialnya bagi masyarakat. Ia kemudian menilai bahwa pada dimensi agama, *Republika* menyokong sikap beragama yang inklusif, toleran, tulus, sekaligus kritis. *Republika* juga bersedia mengembangkan pemahaman keagamaan dan keberagaman yang tajam, segar, dan cerdas guna mendorong terciptanya titik temu dan upaya dialogis antar agama (H.M. Achjar. *Survivalitas Agama di Tengah Arus Media*. Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hal. 14). H.M. Achjar menariknya juga menyinggung peran *Republika* dalam membentuk solidaritas umat Muslim yang akhirnya turut mendorong pengiriman laskar jihad ke Ambon dan Poso oleh salah satu ormas Islam (Achjar, Hal. 18)<sup>4</sup>.

Terakhir ada juga penelitian Mansyur Semma (1998) yang melakukan studi *gatekeeping* dan analisis isi terhadap pemberitaan *Republika* terkait isu peristiwa Timor Timur dan Situbundo. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa *Republika*, terutama terkait peristiwa Timor Timur, cenderung meneguhkan sikap *gatekeeper* *Republika* yang lebih memihak pada kepentingan umat Islam. *Republika* dinilai intensif dan variatif saat memberitakan isu Timor Timur karena ada kepentingan umat Islam disana. Sebaliknya pada peristiwa Situbundo *Republika* dinilai cenderung membatasi dan menyembunyikan informasi (Semma, 1998: 233 dan 244).

---

<sup>4</sup> Penelitian H.M. Achjar sendiri sebenarnya tidak hanya meneliti *Republika*, namun juga Harian *Kompas*, akan tetapi untuk relevansi penelitian ini maka hanya muatan penelitian *Republika* lah yang diambil sebagai contoh

Konsep Toleransi Politik sementara itu telah banyak di teliti oleh para ilmuwan. Penelitian ini sendiri banyak merujuk pada penelitian kuantitatif *Saiful Mujani* mengenai hubungan antara Islam dan Demokrasi di Indonesia, di mana salah satu dimensi yang di ukur dalam penelitian tersebut adalah toleransi politik yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini. Pada penelitian itu sendiri Mujani menemukan bahwa toleransi politik Muslim Indonesia tergolong cukup walaupun tidak dapat dikatakan tinggi (Mujani, Saiful, 2007: 316-317). Penelitian Mujani ini tidak banyak berbicara mengenai media massa dan hanya mengamati toleransi politik yang ada dalam masyarakat, bukan dalam media massa. Penelitiannya juga merupakan penelitian kuantitatif yang sungguh berbeda dari penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif.

## **5.2. Paradigma Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistik yang bergerak dari paradigma positivistik namun tidak sama sekali menolak asumsi-asumsi paradigma tersebut seperti halnya paradigma interpretive dan critical. Secara ontologis paradigma post-positivistik menerima pandangan realis bahwa fenomena berlangsung secara independen dari persepsi dan teori mengenai fenomena tersebut. Post-positivistik juga menerima pandangan social constructionist melalui dua cara. Pertama, mereka meyakini bahwa proses konstruksi sosial berlangsung dalam pola yang tetap dan dapat diamati melalui cara-cara investigasi *social scientific*. Individu memiliki *free will* dan kreativitas, namun mereka umumnya sering berperilaku dengan cara yang telah terpolakan

mudah diduga. Kedua, mereka berpandangan bahwa konstruksi sosial dibentuk secara reguler dan dijadikan sebagai tujuan bagi para aktor dalam dunia sosial, sehingga sangat dimungkinkan untuk mempelajari hasil dari pembentukan konstruksi tersebut (Miller, 2005: 39).

Penelitian ini mengikuti pandangan ontologis post-positivistik dimana menurut penelitian ini ada sebuah pola atau proses produksi berita yang *real* dan relatif baku untuk kemudian diperbandingkan dengan proses yang terjadi di redaksional *Republika*. Akan tetapi penelitian ini juga meyakini bahwa produk pemberitaan yang disusun oleh *Republika* merupakan hasil konstruksi sosial mereka yang memang sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, walaupun mungkin proses konstruksi tersebut jamak terjadi di setiap media dan mungkin menjadi bagian dari realita itu sendiri. Konstruksi inilah yang ingin diketahui oleh penelitian ini melalui pencarian faktor redaksional apa yang paling dominan dalam menentukan kebijakan media dalam harian tersebut. Tujuan akhirnya tentu adalah memahami kebijakan media macam apa yang mereka terapkan dalam pemberitaan religio-politik semasa kampanye kepresidenan 2009 lalu.

### **5.3. Agama dan Toleransi Politik**

Agama telah lama "berpolitik" dalam peta perpolitikan Indonesia. Sejak awal pendiriannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah diwarnai dengan kontroversi mengenai dasar negara antara Islam atau Pancasila yang hingga saat ini isunya masih jamak terdengar. Peta partai politik Indonesia pun banyak terpola berdasarkan afiliasi kepercayaan di mana partai-partai berlandaskan agama,



seperti Masyumi, PPP, PKS, PDKB, dll selalu bermunculan. Berbagai aliran kepercayaan ini terus berkontestifikasi dalam politik Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Partai-partai Islam yang mayoritas cenderung berusaha menempatkan Islam sebagai dasar negara, atau setidaknya sebagai dasar moralitas dalam pelaksanaan pemerintah. Partai-partai non Islam yang minoritas sebaliknya berusaha membendung upaya partai-partai Islam tersebut biasanya dengan cara berkoalisi dengan partai-partai sekuler yang lebih besar. Panggung politik secara tidak di sadari telah menjadi sebuah ajang kontestifikasi agama di mana kepentingan-kepentingan berbagai kelompok keyakinan dipertaruhkan didalamnya.

Fenomena ini bukanlah fenomena yang spesial, karena umumnya dunia memang di penuh dengan pertentangan kultural antara berbagai umat beragama, terutama dalam hal ini antara Islam dengan Nasrani. Samuel P. Huntington pernah menulis sebuah tesis yang menghebohkan bahwa masa depan dunia akan di dominasi oleh konflik antara berbagai kutub kebudayaan, terutama antara Islam dan Barat. Secara khusus Huntington menulis bahwa Islam dan Barat memiliki hubungan konfliktual yang kuat di mana sejarah memperlihatkan bahwa selama 400 tahun hubungan mereka selalu penuh ketegangan. Lebih lanjut ia berkata bahwa konflik abad XX antara demokrasi liberal dengan Marxis-Leninisme hanyalah sebuah fenomena historikal yang bersifat sementara dan superfisial jika dibandingkan dengan hubungan konfliktual antara Islam dengan Kristen (Huntington, 2003: 388). Tesis ini sendiri banyak di kritisi oleh banyak orang karena terlalu simplistik, kurang ilmiah, dan terlalu berpihak pada barat. Akan

tetapi teori ini setidaknya dapat memperlihatkan bahwa konflik antara barat dan Islam dalam berbagai bidang memang *persistent* dan latent.

Indonesia yang menjadi *melting pot* dari berbagai kultur dan agama dunia memiliki potensi laten bagi konflik semacam ini. Umat nasrani di Indonesia misalnya sering di pandang sebagai kepanjangan tangan dari bangsa barat di mana mereka di anggap lebih mudah menerima nilai-nilai barat ketimbang umat Islam. Umat Islam sebaliknya sering di pandang terbelakang dan antitesa dari modernitas peradaban. Kecurigaan-kecurigaan semacam ini akhirnya menjauhkan kedua umat tersebut tidak hanya dalam bidang sosial, namun juga dalam kehidupan politik berbangsa yang sehat. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep demokrasi itu sendiri karena demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila terdapat “*penerimaan warga Negara dan para elite politik atas prinsip-prinsip yang mendasari kebebasan berbicara, berserikat, beragama, dll*” (Lipset dalam Mujani 2007: 153). Kebebasan tersebut dapat berjalan apabila terdapat suatu toleransi politik yang signifikan pada *civil society*. Toleransi politik mengindikasikan adanya penerimaan suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok lain untuk berpolitik dan bernegara yang pada akhirnya melestarikan sistem demokrasi karena toleransi memberikan kemampuan untuk bersikap dan berperilaku adil serta obyektif terhadap berbagai opini, tradisi, agama, nasionalisme, dll yang berbeda dari kita.

*Civil society* sangat terkait dengan toleransi politik karena *civil society* mencerminkan adanya keadilan, persamaan di depan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran sebagai landasan bermasyarakat. *civil society* hanya

dapat berkembang apabila antarsesama pemeluk agama Tuhan dengan keragaman ekspresi keagamaan, keimanan dan ritual di pandang dalam konteks kesamaan ”*jalan menuju tuhan*”. (Qodir 2007: 63). Dalam hal ini Robert N. Bellah pernah mengeluarkan ide menarik yang di sebut sebagai Civil Religion di mana sebuah masyarakat tidak hanya menjalankan sebuah ritual keagamaan mereka, namun juga menjalankan ritual kenegaraan seperti menghormati bendera, menyanyikan lagu wajib, dll. (Bellah dalam Turner, 2006: 70) Artinya di sini umat beragama diberikan kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama mereka, namun saat berperan sebagai warga negara mereka akan meninggalkan seluruh atribut agama mereka dan menggantinya dengan ”kewajiban-kewajiban” kenegaraan seperti menghormati bendera dan dalam arti lebih luas lagi berpartisipasi dalam demokrasi. Saat menjadi civil religion perbedaan agama tidak lagi menjadi penting atau terlihat, karena perbedaan tersebut hanya nampak dalam ruang privat.

Konsep ini menjadi kontekstual bagi Indonesia karena kompleksitas bangsa ini yang tersusun dari berbagai kelompok dan agama di mana perbedaan tersebut lebih sering di politisir ketimbang dijadikan sebagai berkah sehingga kemunculan civil religion akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi konsep ini juga dilematis karena di lihat dari berbagai sudut sangatlah sekuler karena memisahkan dengan pasti antara ruang privat bagi agama dan ruang publik bagi negara. Dilematis karena sekulerisme sendiri cenderung di pandang buruk oleh beberapa kalangan umat Islam di Indonesia.

*Saiful Mujani* sendiri pernah melakukan penelitian mengenai Toleransi Politik pada masyarakat Muslim Indonesia di tahun 2001 dan 2002 sebagai bagian dari penelitiannya mengenai Muslim Indonesia dan demokrasi. Pada saat itu memang ada anggapan bahwa Islam dan demokrasi bukanlah dua buah hal yang dapat disatukan. Terkait dengan toleransi politik ada beberapa hipotesis yang menyatakan bahwa semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak toleran terhadap orang Kristen. Hipotesis ini sebagian memperoleh pembenaran yang empiris. Respon kelompok Islamis memiliki korelasi yang negatif, signifikan, dan konsisten dengan sikap toleran terhadap orang Kristen. Kemudian ada juga hipotesis yang mengatakan semakin taat seorang muslim maka semakin cenderung ia tidak toleran terhadap kelompok yang tidak disukainya. Mujani berhasil menemukan bahwa hipotesis ini tidak terbukti karena tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan sikap toleran terhadap kelompok yang paling tidak di sukai (Mujani, 2007: 316 dan 317). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa toleransi politik di Indonesia masih berkembang dan sukar untuk diketahui. Hasil ini juga menimbulkan pertanyaan yang menarik dikaitkan sikap toleransi politik media Islam di Indonesia, terutama *Republika*. Mengingat mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia juga sedangkan mereka memiliki peran media yang besar.

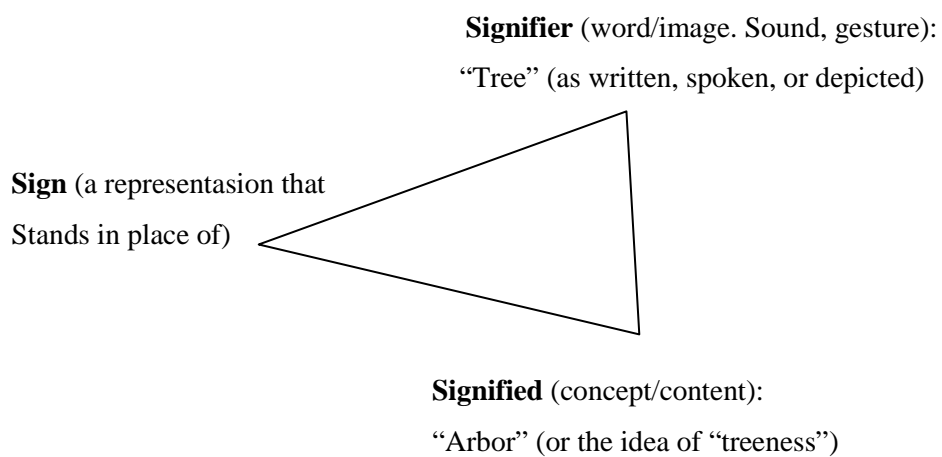
#### **5.4. Semiotika Saussure**

Penelitian ini akan menggunakan analisis *gatekeeping* untuk menemukan jawaban tujuan penelitian, akan tetapi sebelumnya penelitian juga akan melakukan analisis tekstual untuk mendapatkan data tambahan yang mungkin berguna sebagai

pembandingan. Analisis tekstual yang digunakan sendiri di ambil menurut analisis semiotika *Saussure*. Saussure meletakkan tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan melakukan pemilahan antara apa yang disebut signifier (penanda) dan signified (petanda). Signifier adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna (aspek material), yakni apa yang dikatakan dan apa yang di tulis atau di baca. Signified adalah gambaran mental, yakni pikiran atau konsep aspek mental dari bahasa. (Sobur, 2004: 125). Keterkaitan antara ketiga hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1

Keterkaitan Tanda Menurut Saussure



(Moriarty dalam Smith & friends, 2005: 227)

Menurut Saussure tanda (Sign) bersifat arbitrary di mana kombinasi antara Signifier dan signified adalah entitas yang manasuka. Tidak ada hubungan yang natural antara signifier dan signified. Tidak ada alasan intrinsik mengenai

mengapa sebuah benda di beri nama sesuai dengan namanya tersebut. (Culler, 1990: 19). Setiap kata dapat menggantikan nama benda tersebut apabila telah di terima oleh konsensus atau konvensi suatu masyarakat. Hubungan yang arbitrary antara Signifier dan signified juga berarti tidak ada konsep yang universal yang pasti dan universal. Kedua hal tersebut adalah entitas yang benar berbeda. (Culler, 1990: 23).

Saussure memperkenalkan apa yang di sebut sebagai *Langue* dan *Parole*. *Langue* adalah system dari bahasa di mana individu mengasimilasikan bahasa yang ia dengar. System gramatikal yang lahir dari lingkungan social individu tersebut. Sementara itu *Parole* adalah kombinasi darimana individu menggunakan kode dari system bahasa untuk mengekspresikan pemikirannya. Mekanisme psiko-sosial yang membuatnya memperlihatkan kombinasi tersebut. (Culler, 1990: 29, 30). Saussure mengeksplorasi aturan dan konvensi yang mengatur bahasa (*langue*) ketimbang pemakaian dan ujaran secara spesifik yang di pakai individu dalam kehidupan sehari-hari (*parole*). Saussure dan strukturalisme secara umum, lebih banyak menaruh perhatian kepada struktur bahasa daripada pemakaian sebenarnya. (Barker, 2000: 70).

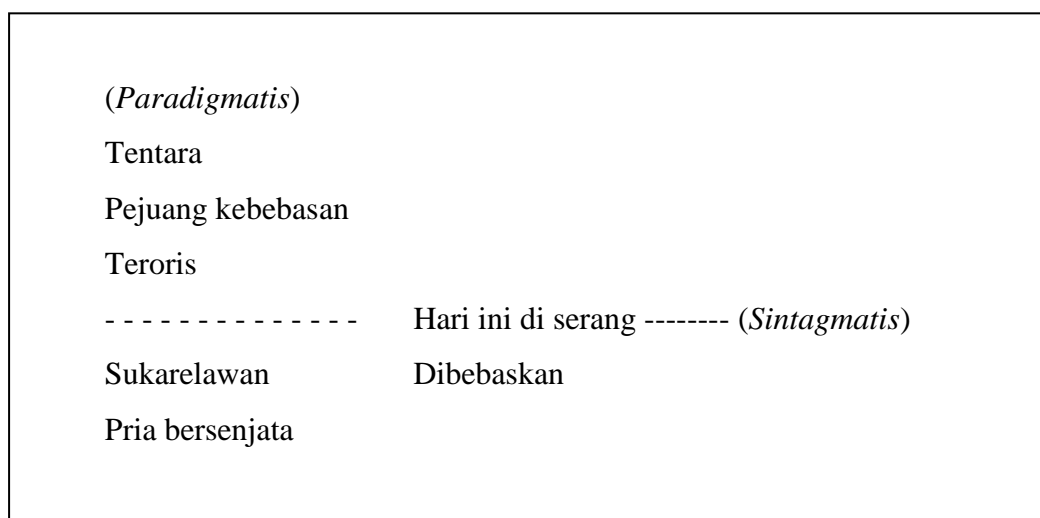
Saussure juga berpendapat bahwa makna dihasilkan melalui proses seleksi dan kombinasi tanda di sepanjang proses sintagmatis dan paradigmatis. Poros sintagmatis di bangun oleh kombinasi linear antar tanda yang membentuk kalimat. Poros paradigmatis mengacu kepada arena tanda (misalnya sinonim) yang darinya segala tanda yang ada di seleksi. Makna diakumulasikan di sepanjang poros

sintagmatik, sementara seleksi dari arena paradigmatis mengubah makna pada poin tertentu dalam kalimat (Barker, 2005: 70).

Dalam konsep analisis ini tanda menjadi bermakna secara sintagmatik apabila di lihat berdasarkan relasinya dengan tanda-tanda lain hingga membentuk suatu sekuen narasi atau kalimat. Tanda-tanda tersebut tidak terbatas hanya pada kata-kata atau frasa-frasa saja namun juga termasuk gambar ilustrasi, warna, ukuran font, dan lain-lain. Sebaliknya makna tanda secara paradigmatis di lihat sebagai pilihan tunggal dari frasa atau ilustrasinya, pilihan tanda yang berbeda dalam hal ini tentu dapat menghasilkan makna yang berbeda pula. Contoh mengenai alur sintagmatis dan paradigmatis ini dicontohkan oleh Barker seperti susunan di bawah ini:

Gambar 2

Proses Sintagmatik-Paradigmatik Saussure Menurut Chris Barker



(Diambil dari Barker, 2005: 70)

Kalimat 'Teroris hari ini di serang' secara sintagmatik dapat dengan mudah diartikan melalui rangkaian kata-katanya bahwa terdapat sebuah peristiwa di mana seorang pelaku tindak terorisme hari ini di serang oleh aparat. Akan tetapi analisis secara paradigmatis akan mengartikan dengan melihat pemilihan kata, frasa, atau tanda-tanda lain didalamnya. Frasa 'teroris' misalnya mungkin saja lebih tepat di ganti dengan kata 'pria bersenjata' atau mungkin kata 'pejuang kebebasan'. Pemilihan frasa yang berbeda ini tentu menghasilkan makna yang sama sekali berbeda. Kalimat 'pejuang kebebasan hari ini di serang' menghasilkan wacana yang lebih positif terhadap pihak yang di serang. Secara sintagmatik dapat saja diartikan bahwa ada seorang militan yang tengah memperjuangkan kebebasan di serang oleh aparat yang merongrong kebebasan kelompoknya. Melalui uraian ini menjadi jelas bahwa setiap pemilihan tanda oleh pembuat berita memiliki maksud tertentu yang ditujukan bagi audiens.

### **5.5. Analisis *Gatekeeping***

Secara kasar *gatekeeping* dapat dianalogikan sebagai proses dimana jutaan pesan yang tersedia di dunia ini diseleksi dan diubah menjadi ratusan pesan yang diterima oleh individu tertentu dalam waktu tertentu (Shoemaker, 1991: 1). Donohue, Tichenor, dan Olien mengusulkan bahwa *gatekeeping* dapat didefinisikan secara luas sebagai proses kontrol informasi yang meliputi segala aspek penyusunan informasi, tidak hanya seleksi namun juga transmisi, pembentukan, display, repetisi pesan, dan pemilihan waktu pengiriman pesan.



Dengan kata lain proses *gatekeeping* meliputi semua aspek seleksi, penanganan, dan kontrol pesan (Donohue, Tichenor, dan Olien dalam Shoemaker, 1991: 1).

Konsep *gatekeeping* dalam ruang lingkup komunikasi awalnya dikemukakan oleh Kurt Lewin dalam teori *channel* dan *gatekeeper* yang ia kemukakan. Disini ia berupaya memahami bagaimana seseorang mampu menghasilkan perubahan sosial yang besar dalam masyarakat, dimana disini ia mengambil contoh perubahan pola makan sebuah populasi. Lewin berkesimpulan bahwa tidak semua anggota populasi memiliki peran yang sama dalam menentukan apa yang harus dimakan, dan perubahan sosial dapat dicapai dengan mengkonsentrasikan pada individu-individu dengan kontrol terbesar pada seleksi makanan di rumah (Shoemaker, 1991: 1).

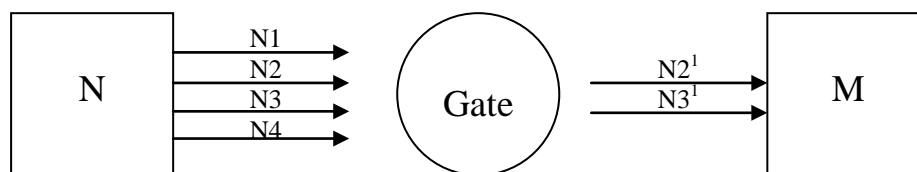
Menurut Lewin makanan dapat disajikan di atas meja melalui berbagai channel. Ada channel yang melalui toko dimana makanan dibeli, dibawa ke rumah, disimpan, dimasak, lalu dipersiapkan di meja. Ada juga jalur melalui penanaman bahan makanan dimana bahan makanan mentah ditanam, dipelihara, dipanen, lalu dimasak dan dipersiapkan di meja. Setiap seksi perpindahan makanan inilah yang disebut sebagai gerbang atau *gate*, dan setiap pergerakannya tersebut diatur oleh seorang atau lebih *gatekeeper* (Shoemaker, 1991: 6, 7, dan 8).

Asumsi Lewin ini tidaklah terbatas pada perubahan pola hidup seseorang saja, namun bisa diaplikasikan secara lebih luas pada aspek-aspek lain, terutama jurnalisme. Peneliti komunikasi pertama yang menerjemahkan teori Lewin dalam penelitian di media massa adalah David Manning White. Ia meneliti perilaku "penyeleksian" berita seorang editor koran di sebuah kota kecil untuk memahami

alasan editor tersebut menerima atau tidak menerima sebuah berita. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perilaku seleksi tersebut sangatlah subjektif. Dari seluruh berita yang ditolak sepertiganya dikarenakan sang editor tidak mempercayai kebenaran berita-berita itu. Dua pertiganya lagi ditolak semata-mata karena tidak ada tempat lagi untuk menerbitkannya (Shoemaker, 1991: 10).

Gambar 3

*Gatekeeping* Menurut David Manning White



Keterangan:

- N : Sumber berita
- N1,2,3,4 : Unit berita
- N2<sup>1</sup>, N3<sup>1</sup> : Unit berita yang terseleksi
- M : Audiens

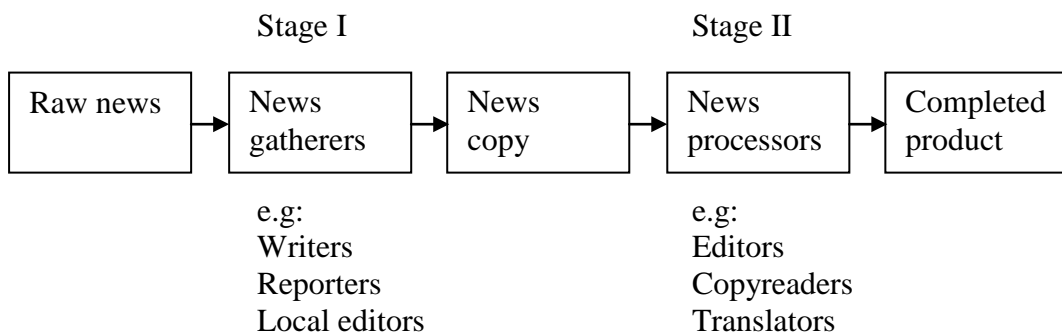
(Diambil dari Shoemaker, 1991: 10 dengan beberapa perubahan kecil)

Model White ini memang masih sederhana dan cenderung menafikan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi seleksi berita, akan tetapi model white ini tetap berkontribusi bagi perkembangan analisis *gatekeeping* dalam lingkup ilmu komunikasi. Model lain yang lebih spesifik dan lengkap kemudian bermunculan, salah satunya adalah model Bass yang telah memiliki unsur wartawan dan editor. Menurutnya individu berlaku seperti representasi dari organisasi saat menjalankan

peran tertentu yang dibutuhkan agar arus informasi dapat berjalan dengan baik dalam organisasi. Bass juga membagi dua tipe gatekeeper berdasarkan fungsinya. Tipe pertama adalah *news gatherer* yang mencari dan memperoleh berita mentah dari berbagai channel dan mengubahnya menjadi copy berita. Tipe kedua adalah *news processor* yang memodifikasi dan menyatukan copy berita kedalam produk jadi yang dapat ditransmisikan ke audiens (Shoemaker, 1991: 14, 15). Model Bass ini dapat dilihat seperti dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4

*Gatekeeping Menurut Bass*



(Diambil dari Shoemaker, 1991: 15)

Model Bass ini menjadi model yang mudah digunakan dalam analisis dan banyak diadopsi oleh peneliti-peneliti *gatekeeping* lain dimana dua unsur utamanya, *news gatherer* atau reporter dan *news processor* atau editor menjadi dua unsur yang paling sering diteliti saat seorang peneliti ingin melakukan penelitian *gatekeeping* terhadap suatu surat kabar.

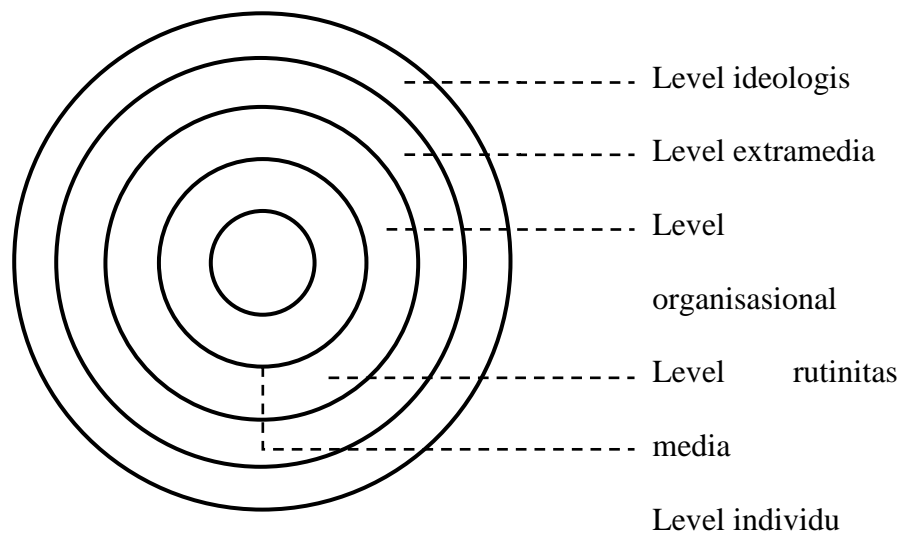
Sementara itu Pamela Shoemaker sendiri telah merumuskan suatu analisis *gatekeeping* yang kompleks dan memperhatikan berbagai aspek. Analisis *gatekeeping* ini sendiri di ambil berdasarkan teori Shoemaker dan Reese mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi isi media. Faktor-faktor ini antara lain:

1. Faktor individual, yang sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, kesukaan, agama, jender, dan sikap individu terhadap peristiwa yang dilaporkannya
2. Faktor rutinitas media, yang terkait dengan rutinitas yang biasa dilakukan media untuk mengolah berita yang masuk dari berbagai pintu berita, termasuk salah satunya dari reporter
3. Faktor organisasi, yang ditentukan oleh struktur yang ditetapkan oleh pola-pola reguler perilaku yang saling bertautan
4. Faktor ekstra media yang datang dari luar media, dan
5. Faktor ideologi yang ditentukan dari kerangka berfikir atau referensi tertentu yang di pakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya (Shoemaker and Reese, 1996: 183 dan Syahputra, 2006: 54-60)

Shoemaker dan Reese menjelaskan berbagai faktor ini sebagai hierarki di mana satu faktor mempengaruhi faktor lainnya dan seterusnya. Hierarki ini sendiri digambarkan oleh Shoemaker dan Reese dalam bagan lingkaran seperti di bawah ini.

Gambar 5

Model Hierarkhis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Isi Media Massa



(Diambil dari Shoemaker and Reese, 1996: 64)

Menurut model ini level individu menjadi level yang paling rendah dan tidak dapat mempengaruhi level lainnya sementara ia sendiri dapat dipengaruhi oleh level yang lain seperti rutinitas media, organisasional, extramedia, dan ideologis. Level ideologis sendiri menjadi level yang paling tinggi dan mampu mempengaruhi level-level lainnya.

Shoemaker melanjutkan konsepsi ini dalam analisis *gatekeeping*. Menurutnya proses *gatekeeping* tidak hanya berarti proses seleksi berita dalam media massa, lebih dari itu Shoemaker mengadopsi pemikiran Donohue, Tichenor, dan Olien yang mengatakan bahwa *gatekeeping* dapat diartikan sebagai

proses yang lebih luas dari kontrol informasi, termasuk didalamnya semua aspek dari *encoding* pesan seperti transmisi, pembentukan, penampilan, repetisi, dan durasi pesan tersebut sampai. Dengan kata lain proses *gatekeeping* melibatkan semua aspek seleksi, penanganan, dan kontrol pesan (Shoemaker, 1991: 1).

Shoemaker merumuskan proses tersebut berdasarkan level hierarkhis faktor-faktor pengaruh isi media yang ia rumuskan bersama dengan Stephen Reese, antara lain:

a Level Individu

Pada level ini Shoemaker menekankan pada pentingnya *values* yang dapat diartikan sebagai prinsip etis dan ideal mengenai 'apa seharusnya' (Bruce dan Yearley, 2006: 314). Shoemaker sendiri lebih banyak mencontohkan *value* tersebut dalam konteks amerika, di mana jurnalis di sana dikatakan mengadopsi ide ethnosentrisme, *altruistic democracy*, *responsible capitalism*, dll (Shoemaker, 1991: 43). Pada konteks penelitian ini sendiri *value* yang akan di lihat adalah model ide atau model ke-Islaman yang di anut oleh individu pekerja media dari harian *Republika*.

Shoemaker juga menekankan pada karakteristik individual, di mana menurut Lewin teradapat dua hal dalam faktor ini, yaitu struktur kognitif dan motivasi. Struktur kognitif mengacu pada apa yang orang pikir dan katakan tentang sesuatu, sedangkan motivasi terkait dengan nilai, kebutuhan, dan halangan individu (Lewin dalam Shoemaker, 1991: 46). Berdasarkan konsepsi ini Shoemaker menilai bahwa pengalaman, kepentingan, dan prasangka yang bervariasi dari seorang komunikator akan

mengakibatkan perbedaan keputusan *gatekeeping*. Akan tetapi ia juga berpendapat bahwa efek ini juga ditentukan oleh seberapa besar kekuasaan dari komunikator tersebut dalam organisasi media massa (Shoemaker, 1991: 47).

Faktor individual juga terkait dengan *Role Conception* atau peran yang diyakini oleh jurnalis. Menurut Cohen terdapat dua peran dasar yaitu netral, di mana jurnalis memandang bahwa mereka semata-mata hanya menyediakan informasi faktual pada audiens, dan partisipan, dimana jurnalis memandang bahwa mereka menjadi bagian dari pembuat kebijakan yang mengembangkan berita untuk disajikan pada audiens (Cohen dalam Shoemaker, 1991: 47). Weaver dan Wilhoit juga mengembangkan konsepsi serupa yang merumuskan jurnalis dalam tiga jenis, yaitu *disseminator* yang berperan hanya menyalurkan informasi pada masyarakat, *interpretive* yang menginterpretasikan informasi pada audiens, dan *adversarial* yang berperan sebagai *watchdog* bagi pemerintah dan perusahaan besar (Weaver dan Wilhoit dalam Shoemaker, 1991: 47).

Terakhir, faktor individual terkait dengan *Types of Jobs* atau tipe pekerjaan dari pekerja media. Bass mengatakan bahwa ada dua tipe pekerjaan jurnalis, yaitu *news gatherer* atau reporter yang mencari dan menulis berita, dan *news processor*, yaitu editor yang memproses berita tersebut (Bass dalam Shoemaker, 1991: 48). Menurut Shoemaker kebanyakan penelitian *gatekeeping* melakukan penelitian pada tipe pekerjaan *news procession*, padahal pemahaman penuh pada proses

*gatekeeping* haruslah melibatkan dua tipe pekerjaan ini (Shoemaker, 1991: 48). Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba untuk melakukan pendekatan pada kedua tipe pekerjaan jurnalis tersebut, yaitu pada wartawan dan redaktur senior *Republika*.

#### b Level Rutinitas Komunikasi

Rutinitas komunikasi atau organisasi di sini adalah praktik-praktik pekerja media dalam melakukan pekerjaan mereka yang telah terutinisasi, dilakukan berulang-ulang, dan telah terpola (Shoemaker and Reese, 1996: 105). Rutinitas tersebut tidak hanya hadir dalam proses pencarian, pemrosesan, dan transmisi berita dalam media massa (contohnya deadline, piramida terbalik, dll) namun juga dalam komunikasi interpersonal (contohnya adanya beberapa kata atau isu yang di anggap tidak pantas untuk ditampilkan) (Shoemaker, 1991: 48). Penelitian ini sendiri tidak akan melakukan analisis pada proses rutinitas komunikasi, karena penelitian ini lebih berupaya untuk memahami kebijakan media dalam suatu pemberitaan religio-politik dikaitkan dengan nilai-nilai yang dianut dalam media tersebut, baik pemilik maupun individu, sehingga sama sekali tidak bersinggungan dengan rutinitas pekerjaan dari para pekerja media di dalamnya.

#### c Level Organisasional

Menurut Shoemaker level organisasional menjadi penting karena organisasi-lah yang menentukan siapa yang mereka pekerjakan dan aturan mana yang diterapkan. Menurut perspektif organisasi seorang *gatekeeper* yang sukses



adalah orang yang dapat secara sempurna merepresentasikan kepentingan organisasi tersebut (Shoemaker, 1991: 53). Kemampuan untuk mempekerjakan dan memecat orang ini bahkan dikatakan sebagai salah satu kekuatan terbesar dari sebuah organisasi (Stewart dan Cantor dalam Shoemaker, 1991: 53).

Terkait dengan level ini Shoemaker juga menekankan pentingnya karakteristik organisasional di mana budaya organisasi dapat di bentuk oleh dan mempengaruhi aktifitas *gatekeeping*. Besar kecilnya organisasi, rigid atau tidaknya birokrasi organisasi tersebut, dan peranan media tersebut, produksi atau distribusi informasi, mempengaruhi sifat dari *gatekeeper* dalam media tersebut (Shoemaker, 1991: 55-56).

#### d Level Extramedia

Media massa berdiri bersama dengan institusi sosial lainnya, di mana banyak di antaranya yang dapat mempengaruhi proses *gatekeeping*. Shoemaker telah merumuskan beberapa faktor ekstramedia yang dapat mempengaruhi proses *gatekeeping* ini, akan tetapi terkait dengan konteks penelitian ini hanya akan di ambil beberapa faktor yang di rasa cukup berkaitan dengan penelitian. Faktor yang pertama adalah Audiens dan Pasar. Menurut Pool dan Shulman audiens dapat mempengaruhi komunikator di mana pesan yang disampaikan sebagian ditentukan oleh keinginan dari reaksi audiens (Pool dan Shulman dalam Shoemaker, 1991: 62). Shoemaker kemudian juga mengatakan bahwa pada organisasi bisnis *gatekeeping* hanyalah bagian dari proses memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan

pengeluaran. Peraturan yang mengatur proses *gatekeeping* di bentuk untuk memaksimalkan daya tarik pasar dan oleh karena itu peraturan *gatekeeping* dapat bervariasi tergantung dari karakteristik pasar (Shoemaker, 1991: 63).

#### e Level Sistem Sosial

Shoemaker berpendapat bahwa *gatekeeping* memiliki keterkaitan kuat dengan sistem sosial, ia sendiri merumuskan sistem sosial tersebut menjadi beberapa, antara lain budaya, kepentingan sosial, struktur sosial, dan ideologi (Shoemaker, 1991: 67, 68). Raymond Williams mendefinisikan ideologi sebagai sistem pemaknaan, nilai, dan keyakinan yang relatif formal dan terartikulasi serta dapat di abstraksi sebagai 'world view' (Williams dalam Shoemaker, 1991: 69). Ideologi sendiri tidak hanya di anut secara personal namun telah menjadi pandangan terintegrasi bagi setiap orang dalam sistem sosial. Menurut Gramsci sistem ideologi mendorong *gatekeeper* melakukan seleksi untuk kepentingan elit yang berkuasa. Media massa dengan demikian menjadi agen yang efektif untuk menciptakan kesadaran semu bagi audiens yang pada akhirnya melestarikan dominasi dari elit penguasa itu sendiri (Shoemaker, 1991: 69).

## **6. Metode Penelitian**

### **6.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis *gatekeeping* menurut Shoemaker and Reese.

## **6.2. Subyek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah surat kabar *Republika*. Harian ini di pilih karena selain menjadi salah satu harian terbesar di Indonesia, *Republika* juga memiliki keterkaitan dengan kelompok agama tertentu. *Republika* di pilih karena di kenal luas telah menjadi representasi umat Islam terutama di daerah Jakarta. Hal ini juga terlihat dari sejarah pendirian surat kabar tersebut yang di dukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Menurut Parni Hadi, pemimpin redaksi *Republika* pertama, Islam dalam berita-berita *Republika* akan bersifat Sublim dan subtil. Bagaikan nafas, ia tidak terlihat tetapi terasa. Kemudian menurut David T. Hill *Republika* merepresentasikan gambaran koran Islam yang lebih cosmopolitan dan *sophisticated* (Parni Hadi dan David T. Hill dalam Sudibyo, 2001: 11)..

## **6.3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, antara lain:

### **a. Data Primer**

Berdasarkan Analisis Semiotika Saussure dan Analisis *Gatekeeping* dari Shoemaker maka ada dua jenis data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Jenis data pertama adalah teks yang di peroleh dari berbagai tulisan pemberitaan surat kabar *Republika*. Data yang di pilih adalah pemberitaan yang terkait dengan kampanye pemilihan presiden yang bermuatan agama. Oleh karena itu surat kabar yang di pilih adalah yang terbit selama masa kampanye, yaitu mulai tanggal 2 Juni hingga 4 Juli 2009.

Akan tetapi penyempitan ini tidak menutup kemungkinan untuk mengambil contoh berita lain di luar masa kampanye asalkan memiliki wacana serupa.

Jenis data kedua adalah hasil wawancara dari pihak-pihak yang memahami kebijakan pemberitaan dari Harian *Republika*. Pihak-pihak ini dapat meliputi wartawan, editor, litbang, dan pihak lainnya yang dapat menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pemberitaan dalam kedua harian tersebut. Redaktur senior atau pimpinan redaksi bagaimanapun juga lebih diutamakan karena sangat terkait dengan level kebijakan dari harian itu sendiri.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari berbagai bacaan dan digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan penelitian ini.

### **6.4. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks. Teks dalam penelitian ini adalah tulisan atau gambar yang terdapat dalam pemberitaan surat kabar *Republika* yang memuat isu kampanye bermuatan agama.

### **6.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan Studi Kepustakaan. Teknik wawancara ditujukan untuk memperoleh data langsung dari redaksional pemberitaan surat kabar *Republika*. Studi kepustakaan

sementara itu digunakan untuk memperoleh teks pemberitaan koran *Republika* serta memperoleh bahan-bahan analisis di luar media.

## **6.6. Analisis Data**

Langkah-langkah penelitian akan di ambil sesuai dengan tahapan analisis semiotika Saussure dan analisis *gatekeeping* Shoemaker. Pada tahapan analisis semiotika akan di ambil tahapan penelitian data menurut Alex Sobur dengan beberapa penyesuaian. Kemudian pada tahapan analisis *gatekeeping* penelitian akan melaukannya secara bertahap terhadap seluruh unsur yang telah dikemukakan oleh Pamela Shoemaker. Tahapan ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Semiotika
  - a. Tentukan pola semiosis yang umum dengan mempertimbangkan sekuen narasinya atau pola sintagmatiknya dan hierarki atau pola paradigmatisnya
  - b. Tentukan kekhasan wacananya dengan mempertimbangkan elemen semiotika yang ada (Disesuaikan dari Sobur, 2004: 154).
2. Analisis *Gatekeeping*
  - a. Analisis *gatekeeper* individual
  - b. Analisis *gatekeeper* organisasi
  - c. Analisis *gatekeeper* ekstramedia
  - d. Analisis *gatekeeper* sistem sosial

### 6.7. *Goodness Criteria*

Sesuai dengan paradigma post-positivistik penelitian ini berpegang pada objektivitas perolehan data dan otentisitas serta kredibilitas data yang didapat. Objektivitas adalah kualitas pikiran dimana peneliti dapat memisahkan properti nyata dari fenomena yang diteliti dari bias dan prasangka atau *prejudice* (Bloor and Wood dalam Turner, 2006: 420). Tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan instrumen tertentu sebagai alat untuk mengukur objektivitas, penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedisiplinan, konsistensi, dan kehati-hatian peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk bebas dari bias dan *prejudice* tersebut.

Kriteria lain yang diharapkan dimiliki dalam penelitian ini adalah kredibilitas atau otentisitas atau validitas data yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai kebenaran data. Kita bisa mendeskripsikan sesuatu sebagai valid sejauh kita bisa menjelaskan bahwa ia benar-benar merepresentasikan apa yang diklaim untuk direpresentasikan (Bruce and Yearley, 2006: 313). Untuk menguji validitas atau kredibilitas data ini maka akan dilakukan teknik triangulasi yaitu melakukan *crosscheck* antar data yang diperoleh, misalnya data hasil wawancara dengan data sumber lain yang dimiliki. Penelitian ini sendiri tidak hanya mengandalkan data wawancara dan data-data lain yang akan diperoleh dari analisis *gatekeeping*, namun juga mengambil dan menganalisis data-data tekstual pemberitaan *Republika*. Dua data inilah yang akan dilakukan *crosscheck* untuk mengetahui dan mendapatkan validitas data penelitian.

Kriteria terakhir yang ini dipenuhi dalam penelitian ini adalah kriteria ketepatan data. Kriteria ketepatan data ini lebih mengacu pada narasumber yang diwawancarai dimana mereka adalah orang-orang yang tepat bagi penelitian ini, yaitu wartawan yang menjalankan kebijakan redaksional di lapangan dan wakil pimpinan redaksi yang turut menentukan kebijakan redaksional harian *Republika*. Selain itu penelitian ini juga memperoleh data-data lain dari harian *Republika* langsung, seperti buku *Republika: 17 Tahun Melintasi Zaman* yang hanya diedarkan terbatas dalam lingkungan internal *Republika* dan ditulis sendiri oleh seorang redaktur senior *Republika*, Anif Punto Utomo.

#### **6.8. Keterbatasan Penelitian**

Terakhir penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini diharapkan memperoleh banyak data dari *Republika*, terutama data wawancara, akan tetapi ternyata selama penelitian sulit sekali mendapatkan akses pada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga penelitian ini harus melengkapinya dengan data-data wawancara lain yang mungkin dapat ditemukan melalui sumber-sumber lain seperti internet. Berikutnya penelitian ini juga hanya melakukan pengkajian teks dan produksi berita harian *Republika* dalam isu politisasi agama (religio-politik). Artinya hasil dari penelitian ini tidak dapat disamakan begitu saja terhadap isu-isu lain yang mungkin sering dikaitkan juga dengan Harian *Republika*, seperti isu konflik agama.